

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Koperasi di Kabupaten Wonogiri diawali oleh kebijakan Bupati Wonogiri yang dikenal dengan program “Satu RT satu koperasi”. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, terkait pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Pelebagaan Koperasi di Wonogiri

Pelebagaan merupakan proses dimana organisasi mendapatkan nilai dan kemandirian atau proses organisasi melembaga. Proses ini terkait dengan komponen- komponen antara lain kaitan memungkinkan, kaitan fungsional, kaitan normatif dan kaitan menyebar.

Dalam kaitan memungkinkan, hasil penelitian menemukan tidak adanya memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan organisasi publik baik itu dengan Dinas Koperasi, dengan kecamatan ataupun dengan kelurahan tempat koperasi berdomisili.

Dalam kaitan fungsional, koperasi ditemukan tidak mampu melaksanakan fungsinya. Bahkan ada koperasi yang dari awal pendirian tidak melaksanakan fungsinya. Ketidakmampuan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagaimana fungsinya ini menunjukkan kaitan fungsional dalam koperasi lemah.

Dalam kaitan normatif, pengurus dan anggota mengetahui norma – norma koperasi. Namun tidak ada kebiasaan untuk melaksanakan. Aturan tersebut sekedar catatan sebagai pelengkap dokumen administratif koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa kaitan normatif koperasi tidak aktif ini rendah. Sebagaimana yang diungkapkan Soekanto (2002) bahwa norma yang ada disuatu organisasi bila baru pada tingkat diketahui anggotanya maka tingkat pelembagaannya paling rendah.

Dalam kaitan menyebar, diketahui koperasi belum mampu memberikan manfaat bagi anggotanya, terlebih pada masyarakat lain yang bukan anggota. Hal ini menunjukkan kaitan menyebar dalam koperasi tidak ada.

Dari uraian di atas mengenai kaitan kaitan yang merupakan komponen pelembagaan, tampak bahwa koperasi lemah dalam semua kaitan sehingga penulis menyimpulkan pelembagaan dalam koperasi tidak aktif di Kabupaten Wonogiri tidak ada. Dengan kata lain koperasi yang tidak aktif tidak melembaga.

5.1.2. Faktor – faktor Penghambat Pelembagaan koperasi di Wonogiri

Tidak melembaganya koperasi di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah faktor – faktor yang menghambat pelembagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri:

5.1.2.1. Kepemimpinan

Lemahnya kepemimpinan dalam koperasi yang ditandai dengan pengurus koperasi cenderung enggan untuk

memperbaiki kondisi di koperasi, tidak ada komunikasi antar pengurus, pengawas dan anggota serta ditiadakannya rapat anggota yang menyebabkan ketidaksinkronan antara anggota pada pengurus dan pengawas.

5.1.2.2. Doktrin

Ada indikasi penyimpangan tujuan pendirian koperasi. Sehingga nilai – nilai yang hendak dibangun yaitu gotong – royong mengentaskan kemiskinan bergeser menjadi gotong royong meraih bantuan. Sehingga doktrin yang dirumuskan sebagai nilai baik menjadi doktrin dengan tujuan tertentu. Ketika doktrin mendirikan koperasi dengan maksud mendapatkan bantuan ini tidak tercapai, maka koperasi pun jalan. Jikalau pun maksud untuk mendapatkan bantuan itu berhasil. Belum tentu koperasinya juga jalan. Bisa saja koperasi ditinggalkan setelah maksud berhasil diperoleh. Koperasi hanya menjadi alat untuk kepentingan pribadi dan tidak lagi sebagai gerakan ekonomi bersama.

5.1.2.3. Program

Bangkrutnya koperasi tidak dilanjutkan dengan merumuskan program terobosan untuk memperbaiki kondisi koperasi. Di sisi lain, pada koperasi yang sejak awal tidak melakukan fungsinya dan hanya menunggu bantuan. menunjukkan bahwa program untuk mensejahterakan anggota,

membantu anggota dan sebagainya seperti yang tertulis pada AD ART, hanyalah sekedar catatan sebagai pelengkap administratif. Dalam alam bawah sadar para pengurus dan anggota koperasi tersebut, program koperasi mereka sebenarnya adalah mencari bantuan

5.1.2.4. Sumber daya

Sumber daya manusia perlu ditingkatkan karena rata – rata anggota koperasi yang tidak aktif adalah tamatan SD dan SMP dengan pekerjaan sebagian besar sebagai petani dan nelayan. Sumber daya modal ditemukan berasal dari hibah dan iuran anggota. Sedangkan pada koperasi yang dari awal pendirian tidak aktif, sumber daya modal berasal dari pendiri. Sarana koperasi belum memadai, sekretariat yang digunakan adalah tempat tinggal ketua pengurus dan aset aset rusak tidak diperbaiki

5.1.2.5. Struktur Internal

Adanya permainan struktur organisasi, yang mana satu orang menjabat ganda dalam koperasi lain, serta adanya nepotisme dalam susunan stuktur organisasi koperasi. Disisi lain, belum maksimalnya kinerja pengurus koperasi sesuai dengan tupoksinya serta tidak adanya komunikasi yang baik antar pengurus sehingga tugas lebih banyak dibebankan pada satu orang. Adanya indikasi permainan struktur organisasi seperti

yang ditemukan, mengindikasikan bahwa niatan awal pembentukan koperasi ini bukan sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, tapi lebih pada motivasi pribadi dan golongan untuk mengejar bantuan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri dan mencermati faktor penghambat pembagaan koperasi, penulis memberikan saran sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Penanggulangan koperasi tidak aktif perlu memfokuskan pada sisi peningkatan pelebagaan koperasi. Peningkatan pelebagaan ini perlu memperhatikan peningkatan di tiap komponen, seperti peningkatan dalam komponen memungkinkan dengan memeberikan penyuluhan administrasi dan tata tertib koperasi, peningkatan komponen normatif dengan memupuk nilai dan norma koperasi, peningkatan komponen fungsional dengan menghidupkan kembali kegiatan koperasi dan komponen tersebar dengan memberikan manfaat koperasi pada masyarakat sekitar.
2. Memberi pembekalan, pendampingan kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi sehingga mampu mengelola koperasi dengan baik, seperti pelatihan menyediakan produksi, pemasaran, pelatihan manajemen. Hal ini dibutuhkan guna menjadikan faktor faktor yang mempengaruhi pelebagaan koperasi seperti kepemimpinan dan doktrin serta program menjadi faktor pendukung hidupnya kembali koperasi.

3. Perlu pembinaan lebih intensif terhadap seluruh koperasi di kabupaten Wonogiri. Pembinaan ini berupa sosialisasi kebijakan, koordinasi rutin untuk mengoptimalkan laporan dan pendampingan.
4. Perlu adanya penambahan personil DinkopUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri khususnya pada seksi kelembagaan dan pengawasan koperasi agar pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap koperasi menjadi lebih optimal.
5. Butuh adanya ketegasan kepada pengurus dan anggota koperasi untuk menyelenggarakan rapat anggota dan menentukan nasib koperasi selanjutnya.
6. Perlunya peran aktif aparatur pemerintah dari tingkat kecamatan, perangkat desa bahkan hingga ke tingkat kepala dusun untuk terus mendampingi koperasi tingkat RT.
7. Perlu adanya penelitian lebih lanjut yang memberikan perhatian kepada pelembagaan koperasi tidak aktif.